

Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar

Sufiati¹, Eva marin sambo², Anim Wiyana³, Saviraislamiati Pattikaloba⁴✉

^{1,2,3,4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. Metode Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah para Pejabat/Aparat Pemerintah Daerah Kota Makassar sedangkan sampel yang diambil berjumlah 30 responden. Hasil kuesioner tersebut telah diuji validitas dan reliabilitasnya, juga telah diuji asumsi klasik berupa asumsi normalitas, asumsi multikolinieritas dan asumsi heteroskedastisitas. Metode analisis data menggunakan regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi, akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi, dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Instansi.

Copyright (c) 2022 Saviraislamia Pattikaloba

✉ Corresponding author :

Email Address : savira_islamiap@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam organisasi sektor publik, kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan, 2014).

Tuntutan akan kinerja yang baik selalu terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan terbitnya otonomi daerah dan penetapan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah. Kinerja pemerintah harus diinformasikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai tingkat pencapaian hasil kerja, yang dikaitkan dengan misi dan visi suatu organisasi. Informasi dilakukan berguna dalam mengambil langkah selanjutnya dengan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan pada program atau kebijakan utama yang akan diambil, dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan sebagai umpan balik untuk bahan perencanaan (Damayanti, 2018).

Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya. Pelaksanaan pembangunan harus mengarah kepada penciptaan Good Governance yang diterjemahkan sebagai "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik". Timbulnya konsep good governance karena adanya ketidakpuasan pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik (Ibrahim,2015).

Prinsip good governance saat ini telah dijadikan Indikator penyelenggaraan pemerintahan bahkan telah dijadikan sebagai kebijakan yang harus dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, baik dalam proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban maupun evaluasi pengawasan program dan kegiatan setiap instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, bahkan penilaian kinerja instansi pemerintahan pun didasarkan pada prinsip good governance.

Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Ombudsman makassar terima 97 laporan sepanjang 2020 tentang buruknya pelayanan publik di pemerintahan kota (Pemkot) selama tahun 2020. Andi Ihwan Patiroy mengatakan dari data yang diterima, ada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemkot yang mendapat aduan paling banyak. Diantaranya Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah daerah kota Makassar masih kurang memuaskan bagi masyarakat. Kinerja pemerintah harus diukur agar diketahui bagaimana pemerintah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Pengukuran kinerja dimulai dengan penetapan indikator kinerja

Fenomena ini menarik perhatian penulis untuk meneliti, sebab Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan seharusnya dapat menjadi teladan bagi kota/kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan mengenai kinerja instansi. Atas fenomena tersebut maka untuk mencapai kinerja instansi pemerintah yang baik, pemerintah daerah dalam proses pembangunannya harus mengarah kepada penciptaan transparansi dan akuntabilitas. Adanya penerapan transparansi dan akuntabilitas, tujuan penting instansi pemerintah dalam

Penelitian sehubungan dengan judul penelitian ini telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya Novianti, dkk (2019) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan. Kemudian peneliti Umar, dkk (2018) pada penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja instansi inspetorat aceh dan memberikan pengaruh nyata dalam meningkatkan kinerja instansi bagi auditor Kantor Inspektorat Aceh.

Serta penelitian sejenis lainnya tetapi memiliki hasil yang berbeda, yaitu penelitian yang dilakukan oleh, Jitmau, dkk (2017) pada penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan, 2014).

Dalam konteks organisasi pemerintah, Kinerja Instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah dalam penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (LAN & BPPK, 2003).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam melakukan pekerjaannya dan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Akuntabilitas juga menitikberatkan pada peranan pengawas dan mengharapkan agar jabatan dan pegawai menetapkan suatu proses perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan kualitas kinerja.

Akuntabilitas juga bersifat berjenjang, dari akuntabilitas yang bersifat individual sampai dengan hasil pembangunan yang merupakan pertanggungjawaban kolektif. Tingkatan akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas teknis, yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya, tingkat akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban outcomes atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.

Transparansi

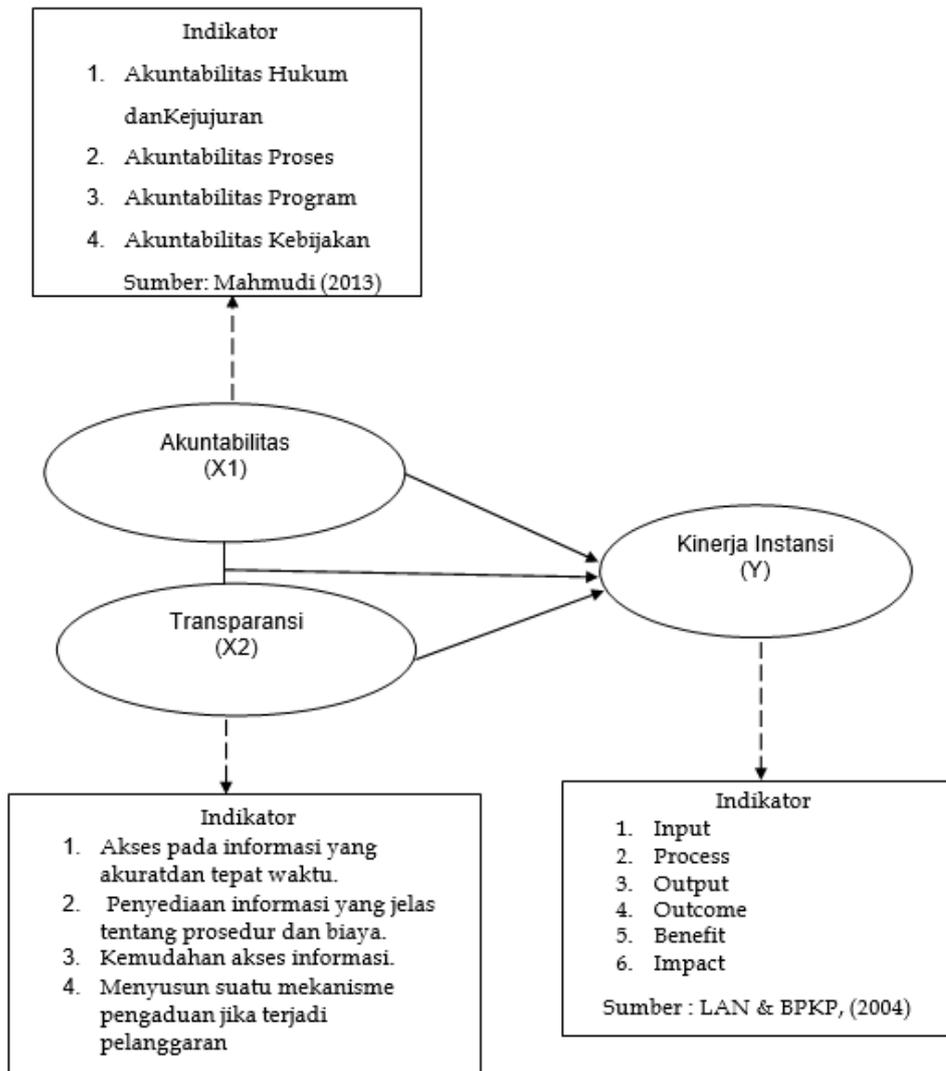
Transparansi adalah bahwa prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta menurut Ratminto, dkk (2009). Selain itu menurut Mahmudi (2011) yaitu keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan.

Mekanisme transparansi adalah cara kerja, aturan-aturan atau pedoman dalam menerapkan transparansi. Menurut Krina (2003:15) mekanisme transparansi mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya jaminan dalam system keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
2. Memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses didalam sektor publik.
3. Adanya fasilitas pelaporan maupun penyebaran informasi public (Kebijakan atau program kerja) maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Berdasarkan uraian diatas, maka model penelitian atau kerangka konseptual yang dibangun adalah terdapat dalam gambar di bawah ini yang menjelaskan kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Gambar 1 Kerangka Konseptual.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Makassar. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Makassar yakni berjumlah 57 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun pertimbangan dalam pemilihan sampel adalah karena keterbatasan waktu penelitian dan jarak dari kantor OPD sehingga peneliti hanya memilih 3 OPD untuk dijadikan sampel. Sedangkan responden dari 3 OPD tersebut adalah Para Pejabat/Aparatur (Kepala Dinas, Sekertaris Dinas, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kasubag Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kasubag Pemanfaatan Data dan Pelayanan, Kasubag Pelayanan Pencatatan Sipil, dan kasubag Pelayanan Pendaftaran Penduduk). Responden dari setiap OPD ada 10 sehingga dengan demikian jumlah total responden adalah sebesar 30.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan dengan menggunakan Spearman correlation dan perhitungan menggunakan SPSS 23 for windows. Syarat minimum yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah $r_{hitung} > r_{tabel}$ dimana $r_{tabel} = 0,30$. Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukur. Untuk hasil perhitungan Spearman correlations (output-nya), sebagaimana terlampir:

1) Hasil Uji Validitas untuk Variabel Akuntabilitas (X1)

Variabel Akuntabilitas (X1) terdiri atas 4 indikator yang dipaparkan ke dalam 7 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji validitas variabel akuntabilitas (X1) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X1)

No	Variabel	Koefesien Korelasi (r_{Hitung})	Nilai Batas Korelasi (r_{tabel})	Keterangan
1	X1.1	0,48	0,30	Valid
2	X1.2	0,85	0,30	Valid
3	X1.3	0,73	0,30	Valid
4	X1.4	0,88	0,30	Valid
5	X1.5	0,73	0,30	Valid
6	X1.6	0,75	0,30	Valid
7	X1.7	0,86	0,30	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa nilai Koefisien Korelasi (r_{hitung}) pada semua item pernyataan variabel akuntabilitas (X1) menunjukkan angka yang lebih besar dari Nilai Batas Korelasi (r_{tabel}) (0,30), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan X1 tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

2) Hasil Uji Validitas untuk Variabel Transparansi (X2)

Variabel Transparansi (X2) terdiri atas 4 indikator yang dijabarkan kedalam 7 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji validitas untuk variabel transparansi (X2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 : Uji validitas variabel Transparansi (X2)

No	Variabel	Koefesien Korelasi (r_{Hitung})	Nilai Batas Korelasi (r_{tabel})	Keterangan
1	X2.1	0,72	0,30	Valid
2	X2.2	0,70	0,30	Valid
3	X2.3	0,60	0,30	Valid
4	X2.4	0,63	0,30	Valid
5	X2.5	0,35	0,30	Valid
6	X2.6	0,34	0,30	Valid
7	X2.7	0,60	0,30	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 2 nampak bahwa nilai r -hitung pada semua item pernyataan variabel transparansi (X2) menunjukkan angka yang lebih besar dari r_{tabel} (0,30), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan (X2) tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

3) Hasil Uji Validitas untuk Variabel Kinerja Instansi

Variabel Kinerja Instansi (Y) terdiri atas 6 indikator yang dijabarkan kedalam 7 pernyataan. Untuk mengetahui hasil uji validitas untuk kinerja instansi (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 : Uji Validitas Variabel Kinerja Instansi(Y)

No	Variabel	Koefesien Korelasi (r_{Hitung})	Nilai Batas Korelasi (r_{tabel})	Keterangan
1	Y.1	0,48	0,30	Valid
2	Y.2	0,85	0,30	Valid
3	Y.3	0,73	0,30	Valid
4	Y.4	0,88	0,30	Valid
5	Y.5	0,73	0,30	Valid
6	Y.6	0,75	0,30	Valid
7	Y.7	0,86	0,30	Valid

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3 nampak bahwa nilai r -hitung pada semua item pernyataan variabel kinerja instansi (Y) menunjukkan angka yang lebih besar dari r_{tabel} (0,30), sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan (Y) tersebut valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

b. Hasil Uji Reabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya dalam mendapatkan data penelitian, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha (α), yang diaplikasikan dengan program SPSS.23. Apabila nilai Cronbach's Alpha (r_{Alpha}) minimal 0,60 maka alat ukur dinyatakan reliable (Nunally, 1978).

Tabel 4 : Hasil Uji Reliabilitas Data pada Variabel X1,X2, dan Y

Variabel	Koefesien Reabilitas Alpha (α)	Nilai Batas Alpha (α)	Keputusan
Akuntabilitas (X1)	0,87	0,60	Reliable
Transparansi (X2)	0,65	0,60	Reliable
Kinerja Instansi (Y)	0,91	0,60	Reliable

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang telah dilakukan yang tertuang pada tabel di atas, terlihat dari keseluruhan item pernyataan pada setiap variabel memiliki nilai koefisien cronbach's alpha di atas 0,60, Variabel Akuntabilitas dengan Cronbach's Alpha 0.87, Variabel Tansparansi dengan Cronbach's Alpha 0.65, Dan Variabel Kinerja Instansi dengan Cronbach's 0.91 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner untuk setiap

variabel dalam penelitian ini dinyatakan semua reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan mampu memperoleh data yang konsisten.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang mempunyai distribusi yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov- Smirnov Test. Jika nilai probability lebih dari 0,05 maka dikatakan data berdistribusi normal. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5 : Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize dPredicted Value
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	31.000000
	Std. Deviation	3.66030944
Most Extreme Differences	Absolute	.124
	Positive	.092
	Negative	-.124
Test Statistic		.124
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 - b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. This is a lower bound of the true significance.
- Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test pada tabel diatas, menunjukkan nilai signifikan (Asymp. Sig) sebesar 0.200. ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari tingkat signifikan sebesar 5% (0.05). jadi dapat disimpulkan bahwa data residual yang di uji terdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi klasik.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Semakin besar korelasi diantara sesama variabel, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar eror yang semakin besar pula. Pengujian multikolenioritas dilakukan dengan melihat nilai VIF dari nilai tolerance. Berikut adalah output dari uji multikolenioritas:

Tabel 6 : Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant) AKUNTABILITAS	.431	2.320

TRANSPARANSI	.431	2.320
--------------	------	-------

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Data diolah, 2021

Dilihat dari Tabel 6 diatas diketahui bahwa nilai Tolerance Variable Akuntabilitas (X1) 0,431 lebih besar 0,10, dan Variabel Transparansi (X2) 0,431 lebih besar 0,10, dan nilai VIF Variabel Akuntabilitas 2.320, dan Variabel Transparansi 2.320 lebih kecil dari 10.00 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui dalam model terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Gletser. Berikut adalah output dari uji Heteroskedastisitas.

Tabel 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	6.212	1.677	3.704	.001
AKUNTABILITAS	.080	.066	1.219	.233
TRANSPARANSI	.088	.085	1.031	.312

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai signifikan Variabel Akuntabilitas (X1) sebesar 0,233 lebih besar dari 0,05, dan Variable Transparansi (X2) sebesar 0,312 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data dapat diuji pada pengujian selanjutnya.

Pembahasan

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis data secara deskriptif tentang akuntabilitas, transparansi dan kinerja instansi dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 8 : Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
KINERJA	31.0000	3.94794	30
AKUNTABILITAS	30.6667	3.51679	30
TRANSPARANSI	29.7667	2.71247	30

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.16 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata variabel Akuntabilitas 30,66 lebih besar dari standar deviasi sebesar 3,51 dan variabel Transparansi 29,76 lebih besar dari standar deviasi sebesar 2,71. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data instrument variabel Akuntabilitas dan Transparansi tersebar dengan baik. Begitupun dengan nilai rata-

rata variabel Kinerja Instansi 31,00 lebih besar dari nilai deviasinya 3,94. Hal ini menunjukkan instrument data variabel Y tersebar dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pada instrument Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Instansi dikatakan tersebar dengan baik karena nilai rata-rata setiap instrument lebih besar dari nilai deviasinya.

2. Analisis Statistik Inferensial

a. Perhitungan dan Analisis Koefisien Regresi

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda, adapun bentuknya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan

- Y : Kinerja Instansi Pemerintah Daerah α : Konstanta
- $b_{1,2}$: Koefisien Regresi Parsial
- X_1 : Akuntabilitas
- X_2 : Transparansi
- e : Variabel Pengganggu (error)

Hasil perhitungan koefisien regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 9 : Hasil Perhitungan Koefisien Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.815	3.143		2.169	.039
AKUNTABILITAS	.633	.123	.564	5.131	.000
TRANSPARANSI	.619	.160	.425	3.869	.001

a. Dependent Variable: KINERJA

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas hasil yang telah diperoleh dari koefisien regresi diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 6.815 + 0.633X_1 + 0.0619X_2 + e$$

Pada persamaan Dari persamaan diatas menunjukkan hubungan positif antara variabel Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. Variabel Akuntabilitas didapatkan nilai koefisien sebesar 0,633 apabila Akuntabilitas naik 1% maka Kinerja Instansi akan mengalami kenaikan sebesar 6,33% pada saat variabel lainnya tetap (konstan). Variabel Transparansi didapatkan nilai koefisien sebesar 0.0619 apabila Transparansi naik sebesar 1% maka Kinerja Instansi akan mengalami kenaikan sebesar 0,619% pada saat variabel lainnya tetap (konstan).

b. Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis untuk mencari pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dianalisis dengan menggunakan uji F. Hasil pengujian uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 : Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	388.538	2	194.269	82.65	.000
	Residual	63.462	27	2.350	2	b
	Total	452.000	29			

a. Dependent Variable: KINERJA

b. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS

Sumber: Data diolah, 2021

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau F test seperti yang ditampilkan pada tabel diatas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 82.652 dan nilai Ftabel sebesar 2,27 yang dimana Fhitung lebih besar dari Ftabel. Nilai probabilitas 0.000 jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dengan demikian H_0 diterima artinya dengan tingkat kepercayaan 95% variabel Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji secara sendiri-sendiri hubungan antara variabel bebas (Variabel X) dan variabel terikat (Variabel Y) (Sugiyono, 2013:235). Uji t dilakukan dengan memerhatikan signifikansi nilai t pada output perhitungan dengan tingkat alpha 5%. Jika nilai signifikansi uji t lebih kecil dari 5% maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu (parsial).

Pada penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau tidak dengan mengetahui apakah variabel independen secara individual memengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 11 : Hasil Uji T (Uji Parsial)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.815	3.143		2.169	.039
AKUNTABILITAS	.633	.123	.564	5.131	.000
TRANSPARANSI	.619	.160	.425	3.869	.001

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan hasil uji hipotesis pertama (H_{a1}) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Daerah Kota Makassar di terima. Hal ini dibuktikan dari nilai t_{hitung} Akuntabilitas (X1) sebesar 5.131 yang lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1.690 atau $t_{hitung} 5.131 > 1.690 t_{tabel}$. Sementara untuk nilai

koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Kemudian hipotesis kedua (Ha2) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Daerah Kota Makassar juga di terima. Hal ini dibuktikan dari nilai thitung variabel Transparansi (X2) sebesar 3.869 yang lebih besar dari t_{tabel} yakni sebesar 1.690 atau $t_{hitung} 3.869 > 1.690 t_{tabel}$. Sementara untuk nilai koefisien regresi ini dapat dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$). Hasil ini menjelaskan bahwa variabel Transparansi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi pada Pemerintah Daerah Kota Makassar.

3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Analisis Determinasi dalam penelitian dapat dilihat dari nilai R2 (nilai dari 0 sampai 1). Koefisien Determinasi juga dilakukan untuk melihat sejauh mana variabel X dalam mempengaruhi variabel Y dan untuk mengetahui seberapa kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Tabel 12 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.927 ^a	.860	.849	1.53311

Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5.20 diatas tampilan output model summary besarnya Adjusted R Square (koefisien determinasi yang telah disesuaikan) adalah 0,849 (84%) nilai ini menunjukkan bahwa 84% variasi perubahan Kinerja Instansi dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen yaitu Akuntabilitas (X1), dan Transparansi (X2) sedangkan sisanya 16% dijelaskan oleh faktor lain diluar model.

4. Interpretasi Hasil Penelitian

a. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa hasil analisis ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa apabila Akuntabilitas dan Transparansi ditingkatkan pelaksanaannya maka akan meningkatkan Kinerja Instansi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novianti, dkk (2019) dan Umar, dkk (2018) menyatakan bahwa Akuntabilitas Dan Transparansi secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Instansi.

b. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa hasil analisis ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa semakin baik Akuntabilitas maka akan meningkatkan Kinerja Instansi. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal

yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Dengan adanya akuntabilitas Kinerja Instansi akan semakin meningkat, keterbukaan dalam urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan dari masyarakat dapat mencegah terjadinya penyelewengan sumber daya maupun pelanggaran dalam kegiatan pemerintah seperti korupsi dan pelanggaran lainnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novianti, dkk (2019) dan Arifin, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif.

c. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa hasil analisis ini menunjukkan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar. Hasil penelitian ini memberikan makna bahwa Transparansi yang dilakukan pemerintah akan mendorong Kinerja Instansi pemerintah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan program-program pemerintah serta dalam pengambilan keputusan publik. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Transparansi memang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Transparansi, apabila informasi-informasi yang menjadi hak publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan, akan menimbulkan suatu kepercayaan publik yang tinggi terhadap pemerintah sehingga pada akhirnya akan mewujudkan Kinerja Instansi pemerintahan yang baik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jitmau, dkk (2017) dan Arifin, dkk (2020) yang menyatakan bahwa Transparansi berpengaruh positif.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas hasil penelitian, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan bahwa:

1. Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar.
2. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.
3. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Referensi :

- Arifin, W. Muchlis, W. Suhartono, (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fairnes Terhadap Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderisasi, Vol. 1, No.2.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri Tentang Definisi Transparansi, (2014)
- Ibrahim, P. S. (2015). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI Jurnal Tekun (Vol.6).
- Jitmau, F. Kalangi, L. Lambe, L. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- Krina, L. P. L. (2003). Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- LAN & BPKP. (2003). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi.
- LAN & BPKP. (2004). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.
- Lukito. (2014). Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi Kedepan. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.

- Mahmudi, (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Novianti, Kusumah. R. K, Vabiani. D.P. (2019). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Vol.10, No. 1.
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. (2009). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Umar. S, Syawalina. C.F, Kaherunisa. (2018) *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat Aceh*. Vol. 6, No.2, Desember.